



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Sekumpul Ujung No.3 Desa Bincau Kecamatan Martapura

Telp (0511) 6749175

E-mail : dinasperhubungan.kabb Banjar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANJAR NOMOR: HB.OO/12 /DISHUB/2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERHUBUNGAN KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh informasi kinerja dalam rangka penyelenggaraan manajemen kinerja serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penilaian Mandiri Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021);
16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 56); dan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANJAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERHUBUNGAN.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar sebagai ukuran keberhasilan tujuan dan sasaran strategis.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan; menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja; menyusun Rencana Aksi Pencapaian Kinerja; menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Tahun 2025-2030.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. Indikator Kinerja Utama bagi Pejabat Struktural Eselon III dan IV, Fungsional dan Pelaksana tercantum dalam lampiran II dan III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 02 Januari 2026

Kepala Dinas,



Dr. I. GUSTI NYOMAN YUDIANA, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19671210 199010 1 001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN BANJAR
NOMOR : HB.OO/12/DISHUB/2026
TANGGAL : 02 Januari 2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2026**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya kinerja perhubungan berkualitas	Rasio Konektivitas Kabupaten	Keterjangkauan daerah untuk mencapai moda transportasi umum	$\text{RKTJ (Rasio konektivitas transportasi Jalan)} = \frac{\text{RKAP (Rasio konektivitas angkutan umum)} + \text{RKTSDP (Rasio konektivitas transportasi Sungai Danau Penyeberangan)}}{2}$ $\text{RKAP} = \frac{\text{Jumlah kecamatan yang telah terlayani Pelayanan Angkutan Umum}}{\text{Jumlah Kecamatan sekabupaten Banjar}}$ $\text{RKTSDP} = \frac{\text{Jumlah Dermaga yang telah terbangun}}{\text{Jumlah Dermaga Eksisting dan Rencana Dermaga dalam Kebutuhan Dermaga}}$	Kepala Dinas	Laporan Realisasi Perangkat Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
		Tingkat Keselamatan Transportasi daerah Kabupaten/kota	Persentase Tingkat Keselamatan Penumpang Angkutan Umum diwilayah Kabupaten Banjar	100% - (Jumlah kecelakaan angkutan penumpang umum termasuk pada trayek yang ditetapkan oleh Pemda) dibagi dengan (total perjalanan angkutan penumpang umum pada trayek yang ditetapkan oleh Pemda)*100%		Perhitungan Perangkat daerah
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja (SAKIP) dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian diperoleh dari hasil penilaian tim evaluator AKIP atas implementasi SAKIP di perangkat daerah dengan	Komponen penilaian: 1) Perencanaan kinerja 30% 2) Pengukuran kinerja 20% 3) Pelaporan kinerja 15% 4) Evaluasi internal 25% Dari masing-masing komponen penilaian terdapat sub-komponen dengan bobot penilaian: 1) Sub-komponen keberadaan 20% 2) Sub-komponen kualitas 30% 3) Sub-komponen pemanfaatan 50% Kategori penilaian: AA : > 90 – 100 (Sangat Memuaskan) A : > 80 – 90 (Memuaskan) BB : > 70 – 80 (Sangat Baik)		LHE Perangkat Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
			instrumen yang sudah dirumuskan Kementerian PAN dan RB	B : > 60 – 70 (Baik) CC : > 50 - 60 (Cukup Memadai) C : > 30 – 50 (Kurang) D : > 0 – 30 (Sangat Kurang)		

Kepala Dinas,



Dr. I.GUSTI NYOMAN YUDIANA, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19671210 199010 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN BANJAR
NOMOR : HB.OO/12/DISHUB/2026
TANGGAL : 02 Januari 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEJABAT ESELON III DAN IV DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2026

NO .	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUN G JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas	V/C Rasio	Perhitungan Kinerja Jaringan Jalan pada wilayah Kabupaten Banjar	Jumlah Kendaraan Yang lewat pada ruas jalan dibagi kapasitas jalan sesuai perhitungan PKJI	Kepala Bidang Lalu Lintas Perhubungan Darat	Laporan Kinerja Perangkat Daerah
2	Meningkatnya Kelaiakan Transportasi Perhubungan	Persentase Transportasi Perhubungan yang Laik Jalan	Persentase Jumlah Hasil Pemeriksaan yang lulus uji dibandingkan target Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar di Tahun N	(Jumlah Hasil Pemeriksaan Kendaraan yang lulus uji / Target Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar Tahun N) X 100%	Kepala UPT PKB	Laporan Kinerja Perangkat Daerah
3	Meningkatnya Kawasan Parkir Tertib	Persentase Kawasan Parkir Tertib	Persentase titik parkir yang dalam pengawasan dan pembinaan Dinas Perhubungan (retribusi)	jumlah titik parkir yang memiliki ijin dibagi jumlah seluruh target titik parkir yang dalam	Kepala UPTD Terminal dan Parkir	Laporan Kinerja Perangkat Daerah

NO .	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUN G JAWAB	SUMBER DATA
				pembinaan dishub dikali 100%		
4	Meningkatnya Trayek Angkutan Umum	Persentase Izin Trayek Angkutan Umum Yang Aktif	Persentase Trayek yang Aktif	Jumlah Trayek yang Aktif dibagi Jumlah Trayek yang Ditetapkan kali 100%	Kepala Bidang Angkutan Keselamatan Perhubungan Darat	Laporan Kinerja Perangkat Daerah
5	Meningkatnya kualitas Terminal & Halte Sesuai Standar	Persentase terminal & halte yang sesuai standar	Bobot Keterpenuhan terminal (50%), Bobot ketersediaan Prasarana Jalan (50%)	(Bobot keterpenuhan terminal (fasilitas utama dan pendukung) x realisasi keterpenuhan terminal) + (Bobot ketersediaan Prasarana Jalan x realisasi ketersediaan Prasarana Jalan)	Kepala UPTD Parkir & Kepala Seksi Sarana Prasarana	Laporan Kinerja Perangkat Daerah
6	Peningkatan Nilai Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Perhubungan	sesuai Peraturan Bupati Banjar Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penilaian Mandiri Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Nilai IKKI dari hasil Penjaminan Kualitas (tim inspektorat)	Sekretaris	LHE IKKI dari Inspektorat
7	Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran	Persentase Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran,	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan	Persentase terpenuhinyaa dokumen perencanaan,	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Laporan Kinerja Perangkat Daerah

NO .	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUN G JAWAB	SUMBER DATA
	dan evaluasi kinerja yang berkualitas	penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Keuangan dan Aset	
8	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Terpenuhinya Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	Terpenuhinya Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	Kepala Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Aset	Laporan Kinerja Perangkat Daerah
9	Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Tersusunnya dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah tepat waktu	Tersusunnya dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah tepat waktu	Persentase tersusunnya dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah	Kepala Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Aset	Laporan Kinerja Perangkat Daerah
10	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Laporan Kinerja Perangkat Daerah
11	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terfasilitasinya penyelenggaraa	% Terfasilitasinya penyelenggaraan penunjang	Persentase Terpenuhinya Pelayanan	Kepala Sub Bagian Umum	Laporan Kinerja

NO .	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUN G JAWAB	SUMBER DATA
		n penunjang administrasi perkantoran	administrasi perkantoran	Administrasi Umum Perangkat Daerah	dan Kepegawaian	Perangkat Daerah
12	Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan	% Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan	Jumlah Pengadaan BMD dibagi jumlah Kebutuhan dikali 100%	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Laporan Kinerja Perangkat Daerah
13	Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor	Persentase jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	Persentase jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Laporan Kinerja Perangkat Daerah
14	Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Laporan Kinerja Perangkat Daerah
15	Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas	V/C Ratio Jalan di Kabupaten Banjar	Perhitungan Kinerja Jaringan Jalan pada wilayah Kabupaten Banjar	Jumlah Kendaraan Yang lewat pada ruas jalan dibagi kapasitas jalan	Kepala Bidang LLPD	Laporan Kinerja Perangkat Daerah

NO .	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUN G JAWAB	SUMBER DATA
				sesuai perhitungan PKJI		
16	Terpenuhinya Perlengkapan Jalan Sesuai Dengan Kebutuhan	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpenuhi	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpenuhi sesuai dengan kebutuhan	Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia dibagi kebutuhan perlengkapan jalan	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan dan Seksi Fasilitas Perhubungan Darat	Laporan Kinerja Perangkat Daerah
17	Meningkatnya penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada pusat kegiatan dan ruas jalan/ persimpangan	Persentase penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan	Manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dapat diterapkan dibagi kebutuhan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dikali 100%	Kepala Seksi Manajemen, Analisis Dampak Lalu Lintas dan Rekayasa Lalu Lintas	Laporan Kinerja Perangkat Daerah
18	Meningkatnya Kelaiakan Transportasi Perhubungan	Persentase Transportasi Perhubungan yang Laik Jalan	Persentase Jumlah Hasil Pemeriksaan yang lulus uji dibandingkan target Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar di Tahun N	(Jumlah Hasil Pemeriksaan Kendaraan yang lulus uji / Target Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar Tahun N) X 100%	Kepala UPT PKB	Laporan Kinerja Perangkat Daerah

NO .	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUN G JAWAB	SUMBER DATA
19	Meningkatnya Kelaikan Uji Laik Jalan	Persentase Pemeriksaan Uji Laik Jalan yang lulus uji	Persentase Jumlah Kendaraan yang lulus uji dibandingkan dengan Kendaraan yang di uji	$(\text{Jumlah Kendaraan yang lulus uji} / \text{Jumlah Kendaraan yang diuji}) \times 100\%$	Kepala UPT PKB	Laporan Kinerja Perangkat Daerah
20	Meningkatnya Kualitas Sarana dan prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	Persentase kualitas Sarana Prasarana dalam kondisi baik	Persentase Sarana Prasarana PKB dalam Kondisi Baik (Jumlah Sarana Prasarana PKB dalam keadaan baik dibagi dengan Jumlah Sarana Prasarana PKB)	$(\text{Jumlah Sarana Prasarana PKB dalam keadaan baik} / \text{Jumlah Sarana Prasarana PKB}) \times 100\%$	Kepala UPT PKB	Laporan Kinerja Perangkat Daerah
21	Meningkatnya Kawasan Parkir Tertib	Persentase Kawasan Parkir Tertib	Persentase titik parkir yang dalam pengawasan dan pembinaan Dinas Perhubungan (retribusi)	jumlah titik parkir yang memiliki ijin dibagi jumlah seluruh target titik parkir yang dalam pembinaan dishub dikali 100%	Kepala UPTD Terminal dan Parkir	Laporan Kinerja Perangkat Daerah
22	Meningkatnya Efektivitas pengawasan parkir	Persentase Pengawasan titik Parkir	Persentase titik parkir yang dalam pengawasan dan pembinaan Dinas Perhubungan (retribusi)	jumlah titik parkir yang memiliki ijin dibagi jumlah seluruh target titik parkir yang dalam pembinaan dishub dikali 100%	Kepala UPTD Terminal dan Parkir	Laporan Kinerja Perangkat Daerah
23	Meningkatnya Trayek Angkutan Umum	Persentase Izin Trayek Angkutan	Persentase Trayek yang Aktif	Jumlah Trayek yang Aktif dibagi Jumlah Trayek yang	Kepala Bidang AKPD	Laporan Kinerja Perangkat Daerah

NO .	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUN G JAWAB	SUMBER DATA
		Umum Yang Aktif		Ditetapkan kali 100%		
24	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan Barang	Persentase angkutan umum dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik	Persentase perbandingan jumlah trayek angkutan umum dengan kinerja pelayanan yang baik yang dinilai berdasarkan indikator berupa frekuensi, headway, load faktor, tingkat operasi dan tumpang tindih trayek dibandingkan dengan jumlah trayek angkutan umum yang ada	Jumlah trayek angkutan umum dengan kinerja tingkat pelayanan yang baik dibagi jumlah trayek angkutan umum yang ada dikali 100%	Kepala Seksi Angkutan Jalan	Laporan Kinerja Perangkat Daerah
25	Tersedia jumlah angkutan umum yang sesuai standar	Persentase jumlah angkutan umum yang tersedia dan beroperasi	Persentase angkutan umum yang tersedia dan beroperasi	Jumlah angkutan umum yang tersedia dan beroperasi dibagi jumlah kebutuhan angkutan dikali 100%	Kepala Seksi Angkutan Jalan	Laporan Kinerja Perangkat Daerah
26	Meningkatnya kualitas Terminal & Halte Sesuai Standar	Persentase terminal & halte yang sesuai standar	Bobot Keterpenuhan terminal (50%), Bobot ketersediaan Prasarana Jalan (50%)	(Bobot keterpenuhan terminal (fasilitas utama dan pendukung) x realisasi keterpenuhan	Kepala UPTD Terminal dan Parkir & Kepala Bidang Sarana Prasarana	Laporan Kinerja Perangkat Daerah

NO .	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUN G JAWAB	SUMBER DATA
				terminal) + (Bobot ketersediaan Prasarana Jalan x realisasi ketersediaan Prasarana Jalan)		
27	Terpenuhinya Prasarana Terminal sesuai standar	Persentase Prasarana terminal yang sesuai standar	Persentase Fasilitas Terminal yang Memenuhi Standar	(jlh fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe c yang tersedia/jlh fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dgn standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan)*100%	Kepala UPTD Terminal dan Parkir	Laporan Kinerja Perangkat Daerah
28	Terpenuhinya Prasarana jalan yang sesuai standar	Persentase Prasarana jalan yang sesuai standar	Persentase Prasarana Jalan Yang Terpenuhi	Jumlah Prasarana Jalan yang tersedia dibagi kebutuhan Prasarana Jalan	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan Darat	Laporan Kinerja Perangkat Daerah
29	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau	Persentase angkutan sungai dan danau dengan tingkat kinerja	Bobot keterpenuhan dermaga (70%), Bobot ketersediaan kapal yang sesuai standar (30%)	Bobot keterpenuhan dermaga dikali realisasi keterpenuhan dermaga) + (Bobot	Kepala Bidang SARPRAS & Kepala Bidang AKPD	Laporan Kinerja Perangkat Daerah

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUN G JAWAB	SUMBER DATA
		pelayanan yang baik		ketersediaan kapal yang sesuai standar dikali realisasi ketersediaan kapal yang sesuai standar		
30	Meningkatnya kualitas Dermaga Sungai dan Danau	Persentase Dermaga yang sesuai standar	Pembobotan dari kinerja Dermaga/Shelter dan Fasilitas Perlengkapan, Persentase dan Pengawasan Sungai dan Danau sesuai dengan kebutuhan	Jumlah Dermaga/Shelter * bobot 25% + Kondisi Dermaga * bobot 25% + Perencanaan * bobot 25% + Pengawasan * bobot 25%	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan Darat	Laporan Kinerja Perangkat Daerah
31	Meningkatnya layanan perizinan angkutan sungai dan danau	Persentase meningkatnya layanan perizinan angkutan sungai dan danau	Terfasilitasinya dan tersosialisasinya ASD	Jumlah ASD yang terfasilitasi dan tersosialisasi	Kepala Seksi Angkutan Sungai dan Danau	Laporan Kinerja Perangkat Daerah

Kepala Dinas,



Dr. I. GUSTI NYOMAN YUDIANA, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19671210 199010 1 001

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN BANJAR
NOMOR : HB.OO/12/DISHUB/2026
TANGGAL : 02 Januari 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA
FUNGSIONAL DAN PELAKSANA ASN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2026

N O.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNGJA WAB	SUMBER DATA
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen renstra dan Renja yg disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis seperti renstra dan renja	Pelaksana di Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Aset	Laporan Kinerja Perangkat Daerah
2	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD (RKA & RKP-P,DPA & DPA-P)	Jumlah Dokumen RKA SKPD (RKA & RKP-P,DPA & DPA-P)	Pelaksana di Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Aset	Laporan Kinerja Perangkat Daerah
3	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	Jumlah dokumen LAKIP SKPD (LKJIP, LPPD dan LKPJ)	Jumlah dokumen LAKIP SKPD (LKJIP, LPPD dan LKPJ)	Pelaksana di Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Aset	Laporan Kinerja Perangkat Daerah

N O.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
4	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi triwulanan	Jumlah dokumen evaluasi triwulanan	Pelaksana di Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Aset	Laporan Kinerja Perangkat Daerah
5	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Pelaksana di Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Aset	Laporan Kinerja Perangkat Daerah
6	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksana di Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Aset	Laporan Kinerja Perangkat Daerah
7	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN setiap bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN setiap bulan	Pelaksana di Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Aset	Laporan Kinerja Perangkat Daerah
8	Terlaksananya Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	SPJ yang masuk yang terverifikasi	Jumlah dokumen SPJ yang terverifikasi	Pelaksana di Sub Bagian Perencanaan	Laporan Kinerja

N O.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Keuangan dan Aset	Perangkat Daerah
9	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	penyusunan laporan keuangan tahun sebelumnya (n-1)	Jumlah Laporan Keuangan Tahun n-1	Pelaksana di Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Aset	Laporan Kinerja Perangkat Daerah
10	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pelaksana di Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Aset	Laporan Kinerja Perangkat Daerah
11	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pelaksana di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Laporan Kinerja Perangkat Daerah
12	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pelaksana di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Laporan Kinerja Perangkat Daerah
13	Tersedianya Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	Pelaksana di Sub Bagian	Laporan

N O.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Umum dan Kepegawaian	Kinerja Perangkat Daerah
14	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pelaksana di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Laporan Kinerja Perangkat Daerah
15	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Pelaksana di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Laporan Kinerja Perangkat Daerah
16	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Pelaksana di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Laporan Kinerja Perangkat Daerah
17	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksana di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Laporan Kinerja Perangkat Daerah
18	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pelaksana di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Laporan Kinerja Perangkat Daerah

N O.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
						at Daerah
19	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pelaksana di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Laporan Kinerja Perangkat Daerah
20	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pelaksana di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Laporan Kinerja Perangkat Daerah
21	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pelaksana di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Laporan Kinerja Perangkat Daerah
22	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Pelaksana di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Laporan Kinerja Perangkat Daerah
23	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	Pelaksana di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Laporan Kinerja Perangkat

N O.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
	Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya	dibayarkan Pajak dan Perizinannya	dibayarkan Pajak dan Perizinannya		at Daerah
24	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pelaksana di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Laporan Kinerja Perangkat Daerah
25	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pelaksana di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Laporan Kinerja Perangkat Daerah
26	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Pelaksana di Seksi Jaringan dan Fasilitas Perhubungan Darat	Laporan Kinerja Perangkat Daerah
27	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Pelaksana di Seksi Jaringan dan Fasilitas Perhubungan Darat	Laporan Kinerja Perangkat Daerah
28	Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk	Pelaksana di Seksi Manajemen, Analisis Dampak Lalu Lintas dan	Laporan Kinerja Perangkat Daerah

N O.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
	Jalan Kabupaten/Kota	Kebijakan untuk Jalan Kabupaten	Jalan Kabupaten/Kota	Jalan Kabupaten/Kota dalam satu tahun anggaran	Rekayasa Lalu Lintas	
29	Tertatanya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten	Perencanaan dan penetapan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan tertentu	Jumlah laporan penataan manajemen dan rekayasa lain	Pelaksana di Seksi Manajemen, Analisis Dampak Lalu Lintas dan Rekayasa Lalu Lintas	Laporan Kinerja Perangkat Daerah
30	Terdaftar nya Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Pelaksana di UPT PKB	Laporan Kinerja Perangkat Daerah
31	Tersedianya Tanda Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pelaksana di UPT PKB	Laporan Kinerja Perangkat Daerah
32	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Pelaksana di UPT PKB	Laporan Kinerja Perangkat Daerah
33	Terpeliharanya Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana	Pelaksana di UPT PKB	Laporan

N O.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
	Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara		Kinerja Perangkat Daerah
34	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan terbangunnya fasilitas parkir kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan terbangunnya fasilitas parkir kewenangan Kabupaten/kota	Pelaksana di UPTD Terminal dan Parkir	Laporan Kinerja Perangkat Daerah
35	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksana di Seksi Angkutan Jalan	Laporan Kinerja Perangkat Daerah
36	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan	Pelaksana di Seksi Angkutan Jalan	Laporan Kinerja Perangkat Daerah

N O.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
	Kabupaten dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		
37	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah armada angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Angkutan Umum yang Beroperasi	Jumlah Unit Angkutan Umum yang Beroperasi	Pelaksana di Seksi Angkutan Jalan	Laporan Kinerja Perangkat Daerah
38	Terlaksananya Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah terminal yang dilakukan pengembangan pertahunnya	Jumlah terminal yang dilakukan pengembangan pertahunnya	Pelaksana di UPTD Terminal dan Parkir	Laporan Kinerja Perangkat Daerah
39	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang ter rehabilitasi dan terpelihara	Jumlah fasilitas utama dan pendukung yang dipelihara dan direhabilitasi pertahun	Jumlah fasilitas utama dan pendukung yang dipelihara dan direhabilitasi pertahun	Pelaksana di UPTD Terminal dan Parkir	Laporan Kinerja Perangkat Daerah
40	Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Pelaksana di Seksi Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan	Laporan Kinerja Perangkat Daerah

N O.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
41	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Pelaksana di Seksi Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan	Laporan Kinerja Perangkat Daerah
42	Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara dalam tahun anggaran	Pelaksana di Seksi Angkutan Sungai dan Danau	Laporan Kinerja Perangkat Daerah
43	Terlaksananya Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang Dibangun	Terbangunnya Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang Dibangun dalam tahun anggaran	Pelaksana di Seksi Fasilitas Perhubungan	Laporan Kinerja Perangkat Daerah
44	Terfasilitasnya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten dalam	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Pelaksana di Seksi Angkutan Sungai dan Danau	Laporan Kinerja Perangkat Daerah

N O.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kewenangan Kabupaten dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		
45	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksana di Seksi Angkutan Sungai dan Danau	Laporan Kinerja Perangkat Daerah



Kepala Dinas,

Dr. I.GUSTI NYOMAN YUDIANA, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19671210 199010 1 001